



Tercepat Dapatkan Kucuran Dana Desa

DJPb Apresiasi Kinerja Pemkab Kubu Raya

SUNGAI RAYA - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Edih Mulyadi, mengapresiasi kinerja baik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lantaran telah mampu mengantarkan 11 desa di Kubu Raya menjadi desa tercepat dalam menerima kucuran dana desa tahap I tahun 2020. Prestasi kinerja tersebut pun membuat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Penyalur Dana Desa Tercepat Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Barat.

Penghargaan diberikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. Diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji kepada Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

"Saya berharap kinerja terbaik yang dilakukan Pemerintah Kubu Raya ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh kepala daerah lainnya di Kalimantan Barat," kata Edi Mulyadi pada Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, di Aula Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Rabu (12/2).

Dikesempatan yang sama, Edih mengutarakan rasa terimakasih, kepada Pemerintah Kubu Raya, lantaran menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten yang dapat menyalurkan dana desa tercepat di tahun 2020.

Edih menerangkan, cepatnya penyaluran dana desa sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses pembangunan di daerah. Karena itu, dirinya berharap apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait penyaluran dana desa dapat menginspirasi daerah-daerah lainnya di Kalimantan Barat.

"Tentu saya harapkan ini memotivasi kita semua khususnya para kepala daerah untuk juga ikut menyokong dan mempercepat proses penyaluran dana-dana yang disalurkan melalui APBN. Sehingga tujuan proses pembangunan akan semakin cepat dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Lebih jauh Edih mengatakan, keterlambatan penyaluran dana desa disebabkan setidaknya oleh empat faktor. Pertama, keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kedua, belum optimalnya pemahaman pemerintah desa terkait proses pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban dana desa yang benar. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia pada bendahara umum daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan desa.

"Selain itu kebijakan padat karya tunai yang disampaikan pada periode pelaksanaan sebaiknya disampaikan pada periode perencanaan agar dapat langsung diakomodasi dalam APBDes," terangnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengucapkan terimakasih atas inisiatif dari Direktorat Jenderal Per-



FOTO HUMAS PEMKAB KUBU RAYA

PENGHARGAAN: Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menerima penghargaan dari DJPb atas kinerja terbaiknya yang mampu mengantarkan desanya menjadi desa tercepat dalam menerima kucuran dana desa tahap I tahun 2020

bendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.

“Saya ucapkan terima kasih. Inisiatif dari Kanwil DJPb ini, menurut saya, memotivasi kita untuk berkinerja dengan baik,” ucap Muda Mahendrawan.

Kata Muda, dana desa merupakan peluang besar yang diberikan negara untuk pembangunan di daerah. Karena itu, pemerintah

daerah berkewajiban untuk segera menyalurkannya ke desa-desa. Sehingga lebih cepat pula untuk digunakan.

“Berarti lebih cepat juga menggerakkan ekonomi di desa-desa dan lebih cepat mengejar indikator desa mandiri,” jelasnya.

Menurutnya, cepatnya pencairan juga dilakukan demi menghindari keterlambatan-keterlambatan.

Sehingga adanya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dapat dicegah. Terlebih pemerintah saat ini telah mengambil sikap tegas terhadap adanya SILPA.

“Jika terlambat, khawatirnya banyak SILPA. Apalagi menteri keuangan sudah menegaskan, kalau terlalu banyak SILPA akan diberi sanksi. Jadi kita jangan sampai menghilangkan peluang

peluang masyarakat juga,” jelasnya.

Tak kalah penting, lanjutnya, bukan sekadar kecepatan dalam pencairan. Melainkan juga pengelolaan yang harus transparan dan akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Terkait hal itu, Muda mengungkapkan pihaknya akan kembali menggelar penandatanganan nota kesepahaman implementasi transaksi nontunai dalam pengelolaan dana desa oleh seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya.

“Tahun 2019 lalu, baru 28 desa yang mengelola dengan nontunai. Tahun ini seluruhnya akan teken MoU juga untuk pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa secara nontunai. Sehingga kalau ada pencairan, kita lebih cepat mengarahkan agar segera digunakan dan masyarakat pun semakin cepat menerima manfaatnya. Yang pasti dana tersebut lebih terjaga,” terangnya.

Muda menegaskan, efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa di Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan dukungan sistem. Selain lebih memudahkan, juga melindungi dana yang menjadi hak masyarakat.

“Dengan transaksi nontunai akan terlindungi karena semuanya akan lebih jelas melalui rekening. Pada akhirnya itu juga akan menciptakan suatu kepercayaan akuntabilitas yang baik. Jadi sistemlah yang paling penting kita bangun,” pungkasnya. (ash)